

## Resiliensi Kelembagaan BPBD Lombok Tengah dalam Menghadapi Bencana Hidrometeorologi: Studi tentang Kapasitas Adaptif, Koordinasi, dan Inovasi Pelayanan Publik

Lalu Ahmad Murdhani

[murdhani.md@gmail.com](mailto:murdhani.md@gmail.com)

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan menganalisis resiliensi kelembagaan BPBD Lombok Tengah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, dengan fokus pada kapasitas adaptif, koordinasi lintas sektor, dan inovasi pelayanan publik kebencanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, diskusi kelompok terarah, dan studi dokumen terhadap dokumen risiko bencana, laporan kejadian, kebijakan daerah, serta publikasi lokal yang relevan. Analisis data dilakukan secara tematik melalui reduksi data, kategorisasi tema, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Lombok Tengah telah memiliki dasar kelembagaan dalam penanggulangan bencana, seperti struktur organisasi, pengalaman respons, dokumen risiko, jaringan relawan, dan koordinasi dengan pemerintah desa. Akan tetapi, resiliensi kelembagaan masih perlu diperkuat dalam pemanfaatan data risiko, pembelajaran organisasi, koordinasi pra-bencana, dan inovasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa BPBD perlu dipahami bukan hanya sebagai aktor teknis tanggap darurat, tetapi sebagai organisasi publik yang harus adaptif, koordinatif, dan inovatif dalam menghadapi risiko hidrometeorologi. Kontribusi utama penelitian ini adalah perumusan kerangka resiliensi kelembagaan BPBD melalui tiga dimensi, yaitu kapasitas adaptif, koordinasi lintas sektor, dan inovasi pelayanan publik. Kerangka ini dapat menjadi dasar penguatan BPBD agar mampu bekerja lebih responsif, antisipatif, inklusif, dan berkelanjutan dalam pengurangan risiko bencana daerah.

**Kata kunci:** resiliensi kelembagaan; BPBD; bencana hidrometeorologi; kapasitas adaptif; pelayanan publik

*Abstract* - This study aims to analyze the institutional resilience of the Regional Disaster Management Agency of Central Lombok in facing hydrometeorological disasters, focusing on adaptive capacity, cross-sectoral coordination, and public service innovation in disaster management. This research employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observation, focus group discussions, and document analysis of disaster risk documents, disaster reports, local policies, and relevant local publications. The data were analyzed thematically through data reduction, theme categorization, data presentation, interpretation, and conclusion drawing. The findings reveal that the Regional Disaster Management Agency of Central Lombok has established institutional foundations for disaster management, including organizational structure, response experience, risk documents, volunteer networks, and coordination with village governments. However, institutional resilience still needs to be strengthened in terms of risk data utilization, organizational learning, pre-disaster coordination, and service innovation based on community needs. This study finds that the agency should not be understood merely as a technical actor in emergency response, but as a public organization that must be adaptive, coordinative, and innovative in facing hydrometeorological risks. The main contribution of this study is the formulation of an institutional resilience framework for the agency through three dimensions: adaptive capacity, cross-sectoral coordination, and public service innovation. This framework can serve as a basis for strengthening the agency to work more responsively, anticipatorily, inclusively, and sustainably in local disaster risk reduction.

**Keywords:** institutional resilience; Regional Disaster Management Agency; hydrometeorological disasters; adaptive capacity; public service

### 1. Pendahuluan

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menghadapi risiko bencana hidrometeorologi secara berulang. Karakter wilayahnya mencakup kawasan pesisir, wilayah pertanian tadah hujan, permukiman, daerah perbukitan, serta kawasan pariwisata yang berkembang pesat. Kondisi tersebut membuat Lombok Tengah rentan terhadap kekeringan, banjir, banjir

Lalu Ahmad Murdhani, dkk, Resiliensi Kelembagaan BPBD Lombok Tengah dalam Menghadapi Bencana Hidrometeorologi: Studi tentang Kapasitas Adaptif, Koordinasi dan Inovasi Pelayanan Publik bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan. Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lombok Tengah menjelaskan bahwa daerah ini memiliki riwayat kejadian banjir, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrem, serta tanah longsor. Artinya, bencana hidrometeorologi di Lombok Tengah bukan peristiwa insidental, melainkan risiko yang perlu dikelola melalui kapasitas kelembagaan yang adaptif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lombok Tengah memiliki posisi strategis sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana penanggulangan bencana. BPBD tidak hanya bertanggung jawab pada fase tanggap darurat, tetapi juga pada pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penyebaran informasi risiko, penanganan darurat, dan pemulihan. Akan tetapi, kompleksitas bencana hidrometeorologi menuntut BPBD bekerja melampaui pola teknis kedaruratan. Kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem membutuhkan kemampuan membaca perubahan risiko, memperkuat koordinasi lintas sektor, mengelola informasi, mengaktifkan desa dan komunitas, serta mengembangkan pelayanan publik kebencanaan yang cepat dan mudah diakses. Dalam situasi ini, BPBD perlu dipahami sebagai organisasi publik yang membutuhkan resiliensi kelembagaan, bukan hanya sebagai aktor teknis penanganan bencana.

Masalah utama yang masih terlihat adalah kuatnya orientasi respons dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Penelitian tentang kinerja BPBD Lombok Tengah dalam pendistribusian bantuan logistik pascabencana gempa bumi menunjukkan bahwa peran BPBD masih banyak dibaca melalui kemampuan distribusi bantuan, pendataan, koordinasi lapangan, serta penanganan kebutuhan masyarakat setelah bencana terjadi (Widiatni, 2023). Temuan tersebut penting, tetapi juga menunjukkan bahwa kajian mengenai BPBD Lombok Tengah masih cenderung menempatkan BPBD pada fungsi respons teknis. Padahal, bencana hidrometeorologi seperti kekeringan dan banjir membutuhkan kapasitas yang lebih luas, yaitu kemampuan antisipasi, adaptasi, inovasi pelayanan, dan koordinasi lintas perangkat daerah sebelum dampak bencana membesar.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena bencana hidrometeorologi di Lombok Tengah berkaitan langsung dengan kebutuhan layanan publik dasar. Kekeringan berdampak pada ketersediaan air bersih, pertanian, kesehatan masyarakat, dan kehidupan rumah tangga. Banjir dan cuaca ekstrem dapat mengganggu permukiman, akses jalan, sekolah, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi lokal. Penelitian Murdhani et al. (2024) tentang risiko kekeringan di Lombok Tengah menegaskan bahwa analisis risiko diperlukan sebagai dasar mitigasi dan penanggulangan bencana kekeringan. Selain itu, kegiatan edukasi dan kesiapsiagaan kekeringan di Lombok Tengah menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan penguatan pengetahuan dan kewaspadaan terhadap risiko kekeringan, bukan hanya bantuan ketika krisis air telah terjadi (Surya & Suwetha, 2021). Kondisi ini menempatkan BPBD sebagai

Lalu Ahmad Murdhani, dkk, Resiliensi Kelembagaan BPBD Lombok Tengah dalam Menghadapi Bencana Hidrometeorologi: Studi tentang Kapasitas Adaptif, Koordinasi dan Inovasi Pelayanan Publik organisasi publik yang harus mampu menghubungkan data risiko, koordinasi perangkat daerah, dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Sejumlah studi lokal memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas kebencanaan di Lombok Tengah tidak dapat dilepaskan dari peran desa, masyarakat, dan jejaring kelembagaan. Nrrartha et al. (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi tanggap bencana di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, diarahkan untuk membentuk desa tangguh bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat. Aini et al. (2024) juga menjelaskan bahwa Desa Bilebante di Lombok Tengah memiliki potensi bencana gempa bumi dan kekeringan yang tinggi, sehingga pelatihan penanggulangan bencana diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Studi mengenai desa tangguh bencana di Lombok Tengah juga memperlihatkan bahwa BPBD menindaklanjuti kebijakan desa/kelurahan tangguh bencana sebagai bagian dari pengurangan risiko di tingkat lokal. Rangkaian kajian ini menunjukkan bahwa resiliensi kelembagaan BPBD tidak cukup diukur dari kemampuan internal organisasi, tetapi juga dari kemampuannya membangun kapasitas masyarakat dan mengoordinasikan jejaring lokal.

Dalam konteks lebih luas, kajian tentang BPBD di berbagai daerah Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, koordinasi, sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana prasarana, dan inovasi pelayanan. Studi tentang mitigasi bencana oleh BPBD di daerah lain menunjukkan bahwa keberhasilan BPBD tidak hanya ditentukan oleh respons saat darurat, tetapi juga oleh perencanaan, sosialisasi, simulasi, koordinasi, dan keterlibatan masyarakat. Penelitian mengenai sistem peringatan dini elektronik di BPBD Lombok Tengah juga menunjukkan adanya upaya organisasi untuk memperkuat efektivitas peringatan dini melalui rancangan operasional dan pemanfaatan teknologi informasi (Kurniawan, 2025). Temuan ini menandakan bahwa BPBD Lombok Tengah telah bergerak menuju inovasi pelayanan kebencanaan, tetapi perlu dikaji lebih jauh dari perspektif resiliensi kelembagaan.

Walaupun kajian mengenai BPBD Lombok Tengah, kekeringan, desa tangguh bencana, dan kesiapsiagaan masyarakat telah tersedia, masih terdapat celah penelitian dalam melihat BPBD sebagai organisasi publik yang membutuhkan resiliensi kelembagaan. Sebagian besar kajian masih berfokus pada kinerja respons, distribusi logistik, sosialisasi kebencanaan, atau peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana BPBD Lombok Tengah membangun kapasitas adaptif, mengelola koordinasi lintas sektor, belajar dari kejadian bencana, memanfaatkan informasi risiko, serta mengembangkan inovasi pelayanan publik dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Celah ini penting karena tantangan BPBD tidak hanya terletak pada kemampuan merespons bencana, tetapi juga pada kemampuan organisasi untuk berubah, belajar, dan tetap memberikan layanan dalam kondisi risiko yang berulang.

Kebaruan penelitian ini terletak pada cara pandang yang menempatkan BPBD Lombok Tengah bukan hanya sebagai aktor teknis penanggulangan bencana, melainkan sebagai organisasi publik yang membutuhkan resiliensi kelembagaan. Penelitian ini menawarkan analisis melalui tiga dimensi utama, yaitu kapasitas adaptif, koordinasi lintas sektor, dan inovasi pelayanan publik kebencanaan. Kapasitas adaptif merujuk pada kemampuan BPBD membaca risiko, belajar dari pengalaman, dan menyesuaikan strategi kerja. Koordinasi lintas sektor merujuk pada kemampuan BPBD menghubungkan perangkat daerah, pemerintah desa, komunitas, relawan, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Inovasi pelayanan publik merujuk pada kemampuan BPBD mengembangkan layanan informasi, edukasi, peringatan dini, logistik, dan pengaduan kebencanaan yang lebih responsif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis resiliensi kelembagaan BPBD Lombok Tengah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi serta merumuskan kerangka penguatan kapasitas adaptif, koordinasi, dan inovasi pelayanan publik kebencanaan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **studi kasus**. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam resiliensi kelembagaan BPBD Lombok Tengah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Penelitian ini tidak diarahkan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk menjelaskan bagaimana BPBD sebagai organisasi publik membangun kapasitas adaptif, menjalankan koordinasi lintas sektor, dan mengembangkan inovasi pelayanan publik kebencanaan dalam menghadapi risiko banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan.

Metode studi kasus digunakan karena resiliensi kelembagaan BPBD sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, karakter risiko wilayah, struktur organisasi, kapasitas sumber daya, jejaring koordinasi, serta pengalaman daerah dalam menangani kejadian bencana. Kabupaten Lombok Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki risiko hidrometeorologi yang berulang dan berdampak langsung pada layanan publik dasar, seperti penyediaan air bersih, perlindungan masyarakat, akses jalan, permukiman, pertanian, pariwisata, dan kesehatan. Melalui studi kasus, penelitian ini dapat menelaah secara rinci bagaimana BPBD Lombok Tengah bekerja sebagai organisasi publik yang tidak hanya menjalankan fungsi teknis kedaruratan, tetapi juga mengembangkan kemampuan adaptasi, koordinasi, dan inovasi dalam penanggulangan bencana.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah **resiliensi kelembagaan BPBD Lombok Tengah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi**. Unit analisis tersebut mencakup tiga dimensi utama, yaitu kapasitas adaptif, koordinasi lintas sektor, dan inovasi pelayanan publik kebencanaan. Kapasitas adaptif dianalisis melalui kemampuan BPBD membaca risiko, menggunakan data kebencanaan, belajar

Lalu Ahmad Murdhani, dkk, Resiliensi Kelembagaan BPBD Lombok Tengah dalam Menghadapi Bencana Hidrometeorologi: Studi tentang Kapasitas Adaptif, Koordinasi dan Inovasi Pelayanan Publik dari pengalaman bencana, menyesuaikan prosedur kerja, dan mengantisipasi perubahan ancaman. Koordinasi lintas sektor dianalisis melalui relasi BPBD dengan perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, relawan, komunitas lokal, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan media. Inovasi pelayanan publik dianalisis melalui pengembangan layanan informasi, edukasi kebencanaan, peringatan dini, distribusi bantuan, pengaduan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kebencanaan.

Sumber data penelitian terdiri atas **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan diskusi kelompok terarah. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang memiliki pengetahuan, kewenangan, atau pengalaman langsung dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Lombok Tengah. Informan tersebut meliputi pejabat atau staf BPBD Lombok Tengah, perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan, pemerintah desa di wilayah rawan bencana, relawan kebencanaan, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, media lokal, akademisi, serta masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Wawancara diarahkan untuk menggali pengalaman kelembagaan BPBD dalam menghadapi kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, abrasi, dan bencana hidrometeorologi lainnya.

Observasi lapangan dilakukan pada lokasi atau komunitas yang memiliki pengalaman menghadapi bencana hidrometeorologi, seperti wilayah rawan kekeringan, banjir, banjir bandang, gelombang ekstrem, atau tanah longsor. Observasi diarahkan untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan kebencanaan, mekanisme koordinasi lokal, ketersediaan informasi risiko, kesiapan jalur evakuasi, titik kumpul, sarana komunikasi, distribusi bantuan, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan. Observasi juga digunakan untuk memahami bagaimana layanan BPBD diterima oleh masyarakat serta bagaimana inovasi pelayanan kebencanaan dijalankan di tingkat lokal.

Diskusi kelompok terarah dilakukan dengan perangkat desa, relawan, komunitas lokal, dan masyarakat di wilayah rawan bencana hidrometeorologi. Diskusi ini bertujuan menggali persepsi masyarakat mengenai kapasitas BPBD, kecepatan layanan, kualitas informasi risiko, efektivitas koordinasi, kebutuhan pelayanan, hambatan respons, serta bentuk inovasi yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana. Diskusi kelompok juga digunakan untuk memahami sejauh mana masyarakat memandang BPBD sebagai organisasi yang adaptif, responsif, dan mampu membangun jejaring kerja dengan aktor lokal.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lombok Tengah, Rencana Penanggulangan Bencana Daerah, laporan kejadian bencana, laporan distribusi bantuan, dokumen rencana kontingensi, dokumen desa tangguh bencana, standar operasional prosedur, laporan kinerja BPBD, dokumen anggaran, publikasi akademik tentang BPBD

Lalu Ahmad Murdhani, dkk, Resiliensi Kelembagaan BPBD Lombok Tengah dalam Menghadapi Bencana Hidrometeorologi: Studi tentang Kapasitas Adaptif, Koordinasi dan Inovasi Pelayanan Publik Lombok Tengah, serta data kebencanaan dari sumber resmi pemerintah. Data sekunder digunakan untuk memahami peta risiko, kebijakan kelembagaan, struktur koordinasi, program penanggulangan bencana, pola layanan, dan rekam jejak penanganan bencana hidrometeorologi di Lombok Tengah.

Teknik penentuan informan dilakukan secara **purposive** dan dapat dikembangkan melalui **snowball sampling**. Purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penanggulangan bencana, pelayanan kebencanaan, koordinasi lintas sektor, atau pengalaman terdampak bencana hidrometeorologi. Snowball sampling digunakan apabila informan awal merekomendasikan aktor lain yang memiliki informasi penting mengenai praktik kerja BPBD, koordinasi lapangan, inovasi pelayanan, atau kendala kelembagaan yang tidak tercatat dalam dokumen formal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah pemetaan kelembagaan untuk mengidentifikasi struktur organisasi BPBD, mandat kelembagaan, program prioritas, jaringan koordinasi, sumber daya, dan bentuk pelayanan kebencanaan. Tahap kedua adalah pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan diskusi kelompok terarah. Tahap ketiga adalah validasi data melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan konsistensi antara informasi dari BPBD, perangkat daerah, pemerintah desa, masyarakat, relawan, dan dokumen kebijakan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik **analisis tematik**. Tahapan analisis meliputi reduksi data, kategorisasi tema, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, terutama mengenai kapasitas adaptif, koordinasi lintas sektor, inovasi pelayanan publik, hambatan kelembagaan, penggunaan data risiko, dan respons terhadap bencana hidrometeorologi. Kategorisasi tema dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam tema utama, yaitu adaptasi kelembagaan, pola koordinasi, inovasi pelayanan, keterbatasan sumber daya, pembelajaran organisasi, dan kebutuhan penguatan BPBD.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik dan matriks kelembagaan. Narasi tematik digunakan untuk menjelaskan temuan penelitian secara sistematis sesuai tiga dimensi utama penelitian. Matriks kelembagaan digunakan untuk memetakan aktor, peran, sumber daya, bentuk koordinasi, hambatan, dan peluang penguatan resiliensi BPBD. Interpretasi data dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan konsep resiliensi kelembagaan, kapasitas adaptif organisasi publik, koordinasi lintas sektor, inovasi pelayanan publik, serta kajian lokal mengenai BPBD dan bencana hidrometeorologi di Lombok Tengah.

Keabsahan data dijaga melalui **triangulasi sumber**, **triangulasi teknik**, dan **member checking**. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari BPBD, perangkat daerah,

Lalu Ahmad Murdhani, dkk, Resiliensi Kelembagaan BPBD Lombok Tengah dalam Menghadapi Bencana Hidrometeorologi: Studi tentang Kapasitas Adaptif, Koordinasi dan Inovasi Pelayanan Publik pemerintah desa, relawan, masyarakat terdampak, akademisi, media lokal, dan organisasi masyarakat sipil. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, diskusi kelompok terarah, dan studi dokumen. Member checking dilakukan dengan mengonfirmasi temuan utama kepada informan kunci agar interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan pemahaman aktor di lapangan.

Etika penelitian diperhatikan melalui pemberian informasi kepada informan mengenai tujuan penelitian, penggunaan data, dan hak informan untuk memberikan atau menolak informasi. Identitas informan dapat disamarkan apabila diperlukan untuk menjaga kerahasiaan data. Penelitian ini juga memperhatikan sensitivitas informasi kebencanaan, terutama data mengenai masyarakat terdampak, lokasi rawan, distribusi bantuan, dan kapasitas kelembagaan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga relevan bagi penguatan resiliensi kelembagaan BPBD Lombok Tengah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **1) Kapasitas Adaptif BPBD Lombok Tengah dalam Menghadapi Risiko Hidrometeorologi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiliensi kelembagaan BPBD Lombok Tengah sangat ditentukan oleh kapasitas adaptif organisasi dalam membaca perubahan risiko bencana hidrometeorologi. Risiko seperti kekeringan, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan memiliki karakter yang berbeda dengan bencana yang bersifat tiba-tiba. Sebagian risiko hidrometeorologi dapat dipantau melalui perubahan cuaca, curah hujan, kondisi lingkungan, ketersediaan air, perubahan tutupan lahan, serta laporan masyarakat di wilayah rawan. Oleh karena itu, kapasitas adaptif BPBD tidak hanya terlihat dari kemampuan merespons kejadian, tetapi juga dari kemampuan mengantisipasi perubahan risiko sebelum dampak bencana meluas.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa BPBD Lombok Tengah telah memiliki dasar kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, seperti struktur organisasi, pengalaman penanganan bencana, dokumen risiko, jaringan relawan, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan perangkat daerah lain. Akan tetapi, kapasitas adaptif masih menghadapi tantangan pada aspek pemanfaatan data risiko secara berkelanjutan. Dokumen kajian risiko bencana telah mengidentifikasi berbagai ancaman hidrometeorologi di Lombok Tengah, tetapi penggunaan data tersebut dalam perencanaan program, prioritas mitigasi, kesiapsiagaan desa, dan inovasi layanan belum selalu berjalan secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa data risiko belum sepenuhnya menjadi instrumen pembelajaran organisasi yang mengarahkan perubahan strategi BPBD.

Lalu Ahmad Murdhani, dkk, Resiliensi Kelembagaan BPBD Lombok Tengah dalam Menghadapi Bencana Hidrometeorologi: Studi tentang Kapasitas Adaptif, Koordinasi dan Inovasi Pelayanan Publik

Kapasitas adaptif BPBD juga terlihat dari kemampuannya menyesuaikan tindakan terhadap jenis ancaman yang berbeda. Pada bencana kekeringan, BPBD dituntut untuk mengoordinasikan penyediaan air bersih, memetakan wilayah terdampak, berkoordinasi dengan pemerintah desa, dan memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Pada bencana banjir atau cuaca ekstrem, BPBD perlu memperkuat kesiapsiagaan, sistem peringatan, evakuasi, pemantauan titik rawan, dan koordinasi respons cepat. Perbedaan karakter ancaman ini menuntut BPBD memiliki prosedur yang fleksibel, bukan hanya prosedur tanggap darurat yang bersifat umum. Murdhani et al. (2024) menegaskan bahwa risiko kekeringan di Lombok Tengah perlu dianalisis sebagai dasar mitigasi dan penanggulangan pada masa mendatang. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa BPBD perlu memperkuat kapasitas berbasis analisis risiko, bukan sekadar respons setelah bencana terjadi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran organisasi menjadi unsur penting dalam resiliensi kelembagaan BPBD. Setiap kejadian bencana memberikan informasi mengenai kelemahan prosedur, keterbatasan sumber daya, kebutuhan masyarakat, efektivitas koordinasi, dan kecepatan layanan. BPBD yang resilien adalah organisasi yang mampu mengubah pengalaman tersebut menjadi perbaikan sistem kerja. Pembelajaran dapat dilakukan melalui evaluasi pascakejadian, pembaruan data wilayah rawan, penyempurnaan mekanisme distribusi bantuan, peningkatan kapasitas relawan, serta perbaikan komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Tanpa mekanisme pembelajaran, BPBD akan cenderung mengulang pola respons yang sama meskipun risiko dan kebutuhan masyarakat telah berubah.

Temuan ini berkaitan dengan studi Widiatni (2023), yang menunjukkan bahwa kinerja BPBD Lombok Tengah dalam pendistribusian bantuan logistik pascabencana banyak ditentukan oleh pendataan, koordinasi lapangan, dan kemampuan menjangkau masyarakat terdampak. Studi tersebut penting karena memperlihatkan sisi teknis respons BPBD. Akan tetapi, penelitian ini memperluas pembacaan tersebut dengan menempatkan distribusi logistik sebagai bagian dari kapasitas kelembagaan yang perlu terus diperbaiki melalui pembelajaran, adaptasi prosedur, dan integrasi data risiko. Dengan kata lain, kinerja respons tidak cukup dinilai dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari kemampuan organisasi memperbaiki sistem agar lebih cepat, tepat, dan antisipatif pada kejadian berikutnya.

Kapasitas adaptif BPBD Lombok Tengah juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan. Aparatur BPBD tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis penanganan darurat, tetapi juga kemampuan analisis risiko, komunikasi publik, koordinasi lintas sektor, pengelolaan data, fasilitasi masyarakat, dan penggunaan teknologi informasi. Dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang semakin sering dan kompleks, kapasitas aparatur menjadi faktor penting untuk menjaga kesinambungan layanan kebencanaan. Apabila kapasitas sumber daya manusia terbatas, BPBD

Lalu Ahmad Murdhani, dkk, Resiliensi Kelembagaan BPBD Lombok Tengah dalam Menghadapi Bencana Hidrometeorologi: Studi tentang Kapasitas Adaptif, Koordinasi dan Inovasi Pelayanan Publik akan sulit mengembangkan fungsi adaptif karena energi organisasi akan terserap pada tugas-tugas rutin dan respons kedaruratan.

Berdasarkan uraian tersebut, kapasitas adaptif BPBD Lombok Tengah perlu dipahami sebagai kemampuan organisasi untuk membaca risiko, belajar dari pengalaman, menyesuaikan strategi, dan memperbaiki layanan. Kapasitas ini tidak hanya berada pada level individu aparatur, tetapi juga pada sistem kerja organisasi. BPBD yang adaptif harus mampu mengubah data risiko menjadi keputusan, pengalaman bencana menjadi pembelajaran, dan keterbatasan sumber daya menjadi dasar untuk membangun kolaborasi. Dalam konteks bencana hidrometeorologi, kapasitas adaptif menjadi fondasi utama resiliensi kelembagaan.

## **2) Koordinasi Lintas Sektor sebagai Pilar Resiliensi Kelembagaan BPBD**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan pilar penting dalam resiliensi kelembagaan BPBD Lombok Tengah. Bencana hidrometeorologi tidak dapat ditangani oleh BPBD secara tunggal karena dampaknya bersinggungan dengan berbagai sektor layanan publik. Kekeringan berkaitan dengan air bersih, pertanian, kesehatan, dan perlindungan sosial. Banjir berkaitan dengan drainase, tata ruang, permukiman, infrastruktur jalan, dan evakuasi. Cuaca ekstrem dan gelombang ekstrem berkaitan dengan keselamatan masyarakat pesisir, nelayan, pariwisata, dan akses transportasi. Oleh karena itu, BPBD perlu menjalankan fungsi koordinatif yang mampu menghubungkan perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, relawan, komunitas, sektor swasta, media, dan masyarakat sipil.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa koordinasi BPBD Lombok Tengah berjalan dalam beberapa bentuk, seperti koordinasi saat tanggap darurat, pendistribusian bantuan, kegiatan sosialisasi kebencanaan, pelatihan kesiapsiagaan, penyusunan dokumen risiko, dan pembentukan atau pendampingan desa tangguh bencana. Akan tetapi, koordinasi tersebut belum sepenuhnya melembaga sebagai sistem kerja pra-bencana yang rutin dan terukur. Koordinasi sering menguat ketika terjadi bencana atau ketika terdapat kegiatan program tertentu. Setelah kegiatan selesai, intensitas koordinasi dapat menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi masih perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat reaktif, tetapi menjadi bagian dari tata kelola risiko yang berkelanjutan.

Peran pemerintah desa menjadi sangat penting dalam koordinasi penanggulangan bencana hidrometeorologi. Pemerintah desa memiliki kedekatan dengan masyarakat, memahami kondisi wilayah, mengetahui kelompok rentan, dan dapat menyampaikan informasi risiko secara cepat. Studi Nnarththa et al. (2022) mengenai sosialisasi tanggap bencana di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, menunjukkan bahwa pembentukan desa tangguh bencana membutuhkan peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan

Lalu Ahmad Murdhani, dkk, Resiliensi Kelembagaan BPBD Lombok Tengah dalam Menghadapi Bencana Hidrometeorologi: Studi tentang Kapasitas Adaptif, Koordinasi dan Inovasi Pelayanan Publik masyarakat. Aini et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pelatihan penanggulangan bencana di Desa Bilebante penting karena wilayah tersebut memiliki potensi ancaman gempa bumi dan kekeringan. Temuan-temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa resiliensi BPBD tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal organisasi, tetapi juga oleh kemampuannya membangun dan merawat kapasitas desa.

Koordinasi lintas sektor juga menuntut kejelasan pembagian peran. BPBD berperan sebagai koordinator penanggulangan bencana, tetapi perangkat daerah lain memiliki mandat sektoral yang menentukan keberhasilan penanganan bencana hidrometeorologi. Dinas sosial berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan dan bantuan sosial. Dinas kesehatan berkaitan dengan layanan kesehatan darurat dan pencegahan penyakit pascabencana. Dinas pekerjaan umum berkaitan dengan infrastruktur, drainase, dan akses jalan. Dinas pertanian berkaitan dengan dampak kekeringan terhadap petani. Dinas komunikasi dan informatika berkaitan dengan penyebaran informasi dan sistem komunikasi. Pemerintah desa berkaitan dengan mobilisasi masyarakat dan validasi kebutuhan lapangan. Tanpa pembagian peran yang jelas, koordinasi dapat berubah menjadi formalitas administratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan koordinasi BPBD terletak pada keterbatasan sumber daya, perbedaan prioritas antarperangkat daerah, belum optimalnya integrasi data, serta masih adanya kecenderungan melihat kebencanaan sebagai urusan BPBD semata. Dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, cara pandang tersebut menjadi hambatan karena akar masalah dan dampak bencana tersebar di berbagai sektor. Kekeringan, misalnya, tidak hanya membutuhkan distribusi air bersih, tetapi juga pengelolaan sumber daya air, perlindungan petani, edukasi masyarakat, dan perencanaan jangka panjang. Banjir tidak hanya membutuhkan evakuasi, tetapi juga penataan ruang, perbaikan drainase, pengawasan kawasan rawan, dan pengurangan kerentanan permukiman.

Koordinasi yang resilien harus bergerak dari koordinasi saat kejadian menuju koordinasi sebelum kejadian. BPBD perlu memiliki mekanisme pertemuan lintas sektor yang membahas data risiko, prakiraan cuaca, peta wilayah rawan, kesiapan logistik, kondisi kelompok rentan, serta rencana tindakan sebelum bencana terjadi. Pemerintah desa dan relawan juga perlu dilibatkan bukan hanya sebagai penerima arahan, tetapi sebagai bagian dari sistem informasi risiko. Informasi dari desa mengenai kondisi sumber air, titik banjir, kerusakan infrastruktur, kebutuhan warga, dan perubahan lingkungan dapat membantu BPBD memperbarui strategi kerja secara lebih cepat.

Dalam perspektif resiliensi kelembagaan, koordinasi lintas sektor bukan hanya soal mengumpulkan aktor dalam satu forum, tetapi juga membangun kepercayaan, pertukaran informasi, pembagian sumber daya, dan komitmen bersama. BPBD Lombok Tengah perlu memperkuat perannya sebagai simpul koordinasi yang mampu menjembatani aktor formal dan informal. Koordinasi yang kuat

Lalu Ahmad Murdhani, dkk, Resiliensi Kelembagaan BPBD Lombok Tengah dalam Menghadapi Bencana Hidrometeorologi: Studi tentang Kapasitas Adaptif, Koordinasi dan Inovasi Pelayanan Publik akan memperbesar kapasitas BPBD untuk beradaptasi karena organisasi tidak hanya mengandalkan sumber daya internal, tetapi juga memanfaatkan jejaring kelembagaan dan sosial yang tersedia di daerah.

### **3) Inovasi Pelayanan Publik Kebencanaan BPBD Lombok Tengah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik merupakan dimensi penting dalam resiliensi kelembagaan BPBD Lombok Tengah. Pelayanan publik kebencanaan tidak hanya mencakup bantuan saat darurat, tetapi juga informasi risiko, edukasi kesiapsiagaan, peringatan dini, pengaduan masyarakat, distribusi bantuan, pendampingan desa, serta komunikasi kebencanaan yang mudah diakses. Dalam konteks bencana hidrometeorologi, masyarakat membutuhkan layanan yang cepat, jelas, dan responsif karena dampak bencana sering menyentuh kebutuhan dasar seperti air bersih, keselamatan, kesehatan, akses jalan, dan mata pencaharian.

Inovasi pelayanan pertama berkaitan dengan penyediaan informasi risiko yang lebih mudah dipahami masyarakat. Informasi tentang potensi banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, atau gelombang tinggi tidak cukup disampaikan dalam bahasa teknis. BPBD perlu mengembangkan layanan informasi yang sederhana, kontekstual, dan berbasis kebutuhan warga. Informasi harus menjelaskan wilayah mana yang berisiko, apa dampaknya, tindakan apa yang harus dilakukan, dan ke mana masyarakat dapat melapor. Dalam konteks ini, pelayanan informasi menjadi bagian dari fungsi preventif BPBD, bukan sekadar fungsi komunikasi saat darurat.

Inovasi pelayanan kedua berkaitan dengan sistem peringatan dini dan komunikasi cepat. Studi Kurniawan (2025) tentang rancangan sistem peringatan dini elektronik di BPBD Lombok Tengah menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat efektivitas peringatan dini melalui pemanfaatan teknologi informasi. Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini karena inovasi teknologi dapat memperkuat resiliensi kelembagaan apabila diintegrasikan dengan prosedur kerja, kapasitas aparatur, dan jejaring masyarakat. Sistem peringatan dini tidak cukup hanya tersedia secara teknis, tetapi harus terhubung dengan aktor lokal, mekanisme respons, dan tindak lanjut pelayanan.

Inovasi pelayanan ketiga adalah penguatan layanan berbasis desa dan komunitas. BPBD tidak mungkin menjangkau seluruh wilayah rawan secara langsung dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu, pelayanan kebencanaan perlu diperluas melalui desa tangguh bencana, relawan lokal, forum pengurangan risiko bencana, tokoh masyarakat, dan kelompok komunitas. Layanan berbasis komunitas dapat mempercepat penyebaran informasi, pendataan kebutuhan, evakuasi awal, dan perlindungan kelompok rentan. Penelitian Surya dan Suwetha (2021) tentang edukasi dan kesiapsiagaan kekeringan di Lombok Tengah menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan penguatan pengetahuan dan kesiapsiagaan sebelum krisis terjadi. Artinya, inovasi pelayanan BPBD perlu bergerak dari bantuan pascabencana menuju edukasi dan pendampingan pra-bencana.

Inovasi pelayanan keempat berkaitan dengan pendataan dan distribusi bantuan yang lebih akuntabel. Dalam bencana hidrometeorologi, terutama kekeringan dan banjir, kecepatan dan ketepatan distribusi bantuan menjadi ukuran penting kualitas layanan BPBD. Widiatni (2023) menunjukkan bahwa pendistribusian bantuan logistik pascabencana membutuhkan koordinasi dan pendataan yang baik agar bantuan tepat sasaran. Dalam penelitian ini, temuan tersebut dibaca sebagai kebutuhan inovasi pelayanan, yaitu perlunya sistem pendataan kebutuhan yang lebih cepat, kanal pengaduan masyarakat, mekanisme verifikasi berbasis desa, serta transparansi distribusi bantuan. Dengan cara ini, layanan logistik tidak hanya menjadi kegiatan teknis, tetapi juga bagian dari akuntabilitas publik BPBD.

Inovasi pelayanan kelima adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat akses masyarakat terhadap layanan kebencanaan. BPBD dapat mengembangkan kanal informasi melalui media sosial, pusat informasi kebencanaan, sistem pelaporan warga, peta risiko sederhana, atau layanan pengaduan berbasis digital. Akan tetapi, inovasi digital harus memperhatikan kesenjangan akses masyarakat. Tidak semua warga memiliki akses internet, literasi digital, atau kemampuan menggunakan aplikasi. Oleh karena itu, inovasi pelayanan harus menggabungkan kanal digital dan kanal sosial, seperti pemerintah desa, relawan, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, dan jaringan komunitas.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik kebencanaan membutuhkan dukungan organisasi yang memadai. Inovasi tidak dapat berjalan jika hanya bergantung pada inisiatif individu aparatur. BPBD perlu memiliki dukungan anggaran, prosedur kerja, pelatihan aparatur, evaluasi layanan, serta kerja sama dengan perangkat daerah lain. Inovasi juga harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat, bukan hanya dengan penggunaan teknologi baru. Pelayanan yang inovatif adalah pelayanan yang menyelesaikan masalah publik secara lebih cepat, mudah, inklusif, dan akuntabel.

Berdasarkan keseluruhan temuan, resiliensi kelembagaan BPBD Lombok Tengah dapat dipahami sebagai kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap risiko hidrometeorologi, mengoordinasikan aktor lintas sektor, dan mengembangkan layanan kebencanaan yang responsif. Tiga dimensi tersebut saling terkait. Kapasitas adaptif memungkinkan BPBD membaca perubahan risiko. Koordinasi lintas sektor memungkinkan BPBD memperluas sumber daya dan menjangkau masyarakat. Inovasi pelayanan publik memungkinkan BPBD menjawab kebutuhan warga secara lebih cepat dan akuntabel. Dengan demikian, BPBD Lombok Tengah perlu ditempatkan bukan hanya sebagai aktor teknis penanggulangan bencana, tetapi sebagai organisasi publik yang berperan strategis dalam membangun resiliensi daerah.

#### **4. Kesimpulan**

Lalu Ahmad Murdhani, dkk, Resiliensi Kelembagaan BPBD Lombok Tengah dalam Menghadapi Bencana Hidrometeorologi: Studi tentang Kapasitas Adaptif, Koordinasi dan Inovasi Pelayanan Publik

Penelitian ini menunjukkan bahwa resiliensi kelembagaan BPBD Lombok Tengah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dalam merespons kejadian bencana, tetapi juga oleh kemampuan organisasi untuk beradaptasi, berkoordinasi, belajar, dan berinovasi dalam pelayanan publik kebencanaan. Risiko hidrometeorologi seperti kekeringan, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan kapasitas kelembagaan yang lebih luas daripada sekadar penanganan darurat. BPBD perlu mampu membaca perubahan risiko, mengelola informasi, mengoordinasikan aktor lintas sektor, serta memastikan layanan kebencanaan dapat menjangkau masyarakat secara cepat, tepat, dan inklusif.

Hasil penelitian memperlihatkan tiga temuan utama. Pertama, kapasitas adaptif BPBD Lombok Tengah mulai terbentuk melalui pengalaman penanganan bencana, keberadaan dokumen risiko, jaringan relawan, dan koordinasi dengan pemerintah desa. Akan tetapi, kapasitas tersebut masih perlu diperkuat agar data risiko, pengalaman bencana, dan evaluasi pascakejadian benar-benar menjadi dasar perbaikan strategi organisasi. Kedua, koordinasi lintas sektor menjadi pilar penting resiliensi kelembagaan karena bencana hidrometeorologi berdampak pada banyak sektor layanan publik, seperti air bersih, pertanian, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, permukiman, dan pariwisata. Ketiga, inovasi pelayanan publik kebencanaan perlu dikembangkan agar BPBD tidak hanya hadir ketika bencana terjadi, tetapi juga mampu menyediakan informasi risiko, edukasi kesiapsiagaan, peringatan dini, layanan pengaduan, distribusi bantuan yang akuntabel, dan pendampingan komunitas sebelum serta sesudah bencana.

Kontribusi utama penelitian ini adalah perumusan cara pandang baru terhadap BPBD Lombok Tengah sebagai organisasi publik yang memerlukan **resiliensi kelembagaan**. Penelitian ini menempatkan resiliensi kelembagaan dalam tiga dimensi utama, yaitu kapasitas adaptif, koordinasi lintas sektor, dan inovasi pelayanan publik. Kapasitas adaptif menunjukkan kemampuan BPBD membaca risiko, belajar dari pengalaman, dan menyesuaikan strategi kerja. Koordinasi lintas sektor menunjukkan kemampuan BPBD menghubungkan perangkat daerah, pemerintah desa, relawan, komunitas, sektor swasta, media, dan masyarakat sipil. Inovasi pelayanan publik menunjukkan kemampuan BPBD mengembangkan layanan kebencanaan yang lebih cepat, mudah diakses, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran perspektif dari BPBD sebagai pelaksana teknis penanggulangan bencana menuju BPBD sebagai organisasi publik yang harus adaptif, koordinatif, dan inovatif. Sebagian kajian tentang BPBD masih banyak menekankan aspek respons, distribusi bantuan, sosialisasi, atau pelaksanaan program kebencanaan. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan menegaskan bahwa efektivitas BPBD dalam menghadapi bencana hidrometeorologi tidak cukup dinilai dari kecepatan respons darurat, tetapi juga dari kemampuan membangun pembelajaran organisasi,

Lalu Ahmad Murdhani, dkk, Resiliensi Kelembagaan BPBD Lombok Tengah dalam Menghadapi Bencana Hidrometeorologi: Studi tentang Kapasitas Adaptif, Koordinasi dan Inovasi Pelayanan Publik memperkuat jejaring kelembagaan, memanfaatkan data risiko, dan mengembangkan pelayanan publik kebencanaan yang berkelanjutan.

Implikasi penelitian ini terhadap kajian manajemen kebencanaan adalah perlunya melihat kelembagaan BPBD sebagai bagian dari tata kelola publik yang dinamis. BPBD tidak dapat bekerja sendiri karena risiko hidrometeorologi berkaitan dengan banyak sektor dan aktor. Oleh karena itu, penguatan BPBD harus diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur, integrasi data risiko, mekanisme koordinasi pra-bencana, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan layanan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam konteks praktis, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu memperkuat dukungan anggaran, sumber daya manusia, sistem informasi kebencanaan, forum koordinasi lintas sektor, dan inovasi pelayanan agar BPBD mampu bekerja lebih responsif dan antisipatif.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji resiliensi kelembagaan BPBD Lombok Tengah pada jenis bencana hidrometeorologi yang lebih spesifik, seperti kekeringan, banjir, atau cuaca ekstrem. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan *mixed methods* untuk mengukur resiliensi kelembagaan melalui indikator kuantitatif, seperti kecepatan respons, kualitas koordinasi, tingkat pemanfaatan data risiko, kepuasan masyarakat terhadap layanan kebencanaan, efektivitas distribusi bantuan, dan keberlanjutan inovasi pelayanan publik. Selain itu, studi komparatif antar-BPBD di wilayah Nusa Tenggara Barat penting dilakukan untuk melihat variasi kapasitas adaptif, pola koordinasi, dan inovasi pelayanan publik dalam menghadapi risiko hidrometeorologi yang semakin meningkat.

## Daftar Pustaka

- Aini, N., Putri, R. A., & Hidayat, M. (2024). Pelatihan penanggulangan bencana pada masyarakat Desa Bilebante Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2016). *Risiko bencana Indonesia*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2017). *Dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017–2021*. Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, BNPB.
- Kurniawan, M. R., & Wahyudi, E. (2025). *Efektivitas sistem peringatan dini berbasis elektronik dalam mengurangi kekeringan di Kecamatan Praya Tengah* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. Repository IPDN.
- Murdhani, L. A., Mujahidin, Kasmita, F., & Marzuki. (2024). Analisis resiko bencana kekeringan di Lombok Tengah sebagai upaya mitigasi bencana. *Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium*, 1(1), 1–13.
- Nratha, I. M. A., Yadnya, M. S., Sultan, S., & Wiryajati, I. K. (2022). Sosialisasi tanggap bencana menuju desa tangguh bencana di Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(3).

- Lalu Ahmad Murdhani, dkk, Resiliensi Kelembagaan BPBD Lombok Tengah dalam Menghadapi Bencana Hidrometeorologi: Studi tentang Kapasitas Adaptif, Koordinasi dan Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. (2024). *Kajian risiko bencana Kabupaten Lombok Tengah periode 2024–2028*. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
- Surya, I. S., & Suwetha, I. G. N. (2021). Edukasi bencana kekeringan dan kesiapsiagaan warga masyarakat dalam menanggulangi bencana kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 3(1), 28–44. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v3i1.1519>
- Widiatni, W. (2023). *Kinerja BPBD dalam pendistribusian bantuan logistik pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. Repository IPDN.